



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LAKIP 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

 [pemkab simalungun](#)  [kominfo_simalungun](#)  [@pemerintahkabsimalungun](#)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun dapat diselesaikan tepat waktu. Perwujudan Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal penting dalam Upaya mewujudkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang cepat berubah dan masyarakat yang semakin kritis terhadap pelayanan aparatur pemerintah, instansi pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik melalui kinerja dan pelayanan publik yang memadai. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun setiap akhir tahun melaporkan hasil kinerjanya kepada Kemendagri. Hal ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kewajiban sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipercaya. Sesuai ketentuan penyusunan Laporan Kinerja maka seperti tahun-tahun sebelumnya Dinas Komunikasi dan Informatika Simalungun juga melaporkan hasil capaian kinerja selama setahun dengan memakai pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas komunikasi dan Informatika disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Realisasi Kinerja yang berorientasi pada Revisi Rencana Strategis Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Pamatang Raya, Maret 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ANDRI RAHADIAN, AP
PEMBINA TK I
NIP. 197408051993111001

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun menjabarkan capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024 sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja 2024 dan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah pada perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tetap berdasar pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026.

Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2024 ditetapkan lima sasaran strategis dengan lima indikator kinerja sasaran yaitu, sebagai berikut:

1. Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
2. Terpenuhiya kualitas Pelayanan Informasi Publik.
3. Terpenuhiya Layanan Hubungan Media.
4. Terpenuhiya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

Berikut rincian capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu Pengelolaan Media Komunikasi Publik	100%	99.11%	99.11 %
2	Persentase Pelayanan Informasi Publik	100 %	76.65 %	76.65 %
3	Tingkat Layanan Hubungan Media	100 %	99.97%	99.97%
4	Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100 %	99,97 %	99,97 %
5	Presentase Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	100 Orang	82.56%	80 Orang sasaran
6	Presentase Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	100 orang	97,66%	80 Orang Sasaran

	Kabupaten/Kota			
--	----------------	--	--	--

Dalam mencapai kinerja yang ditargetkan dilakukan berbagai upaya yaitu,

1. Penyusunan Dokumen Rencana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun Tahun 2021 – 2026 sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan bidang Komunikasi untuk lima tahun ke depannya; pelaksanaan;
2. Melakukan Pelatihan dan sosialisasi di Sosialisasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kominfo bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi publik di bidang komunikasi dan informatika, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
3. Pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten Simalungun, mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan komunikasi publik, termasuk pengelolaan konten, media, dan saluran komunikasi, serta layanan hubungan media;
4. Pelayanan informasi publik adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pelayanan ini harus dilakukan oleh badan publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
5. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektor di daerah bertujuan untuk mewujudkan data yang berkualitas dan mudah diakses oleh pengguna data, mendukung pembangunan daerah, dan mengimplementasikan Satu Data Indonesia.
6. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun bertujuan untuk melindungi informasi publik yang dikecualikan melalui penetapan pola hubungan komunikasi sandi yang melibatkan tahapan identifikasi, analisis, koordinasi, dan penetapan

Adapun kendala yang dialami adalah :

Kurangnya Perhatian Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang bertugas sebagai menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam pemerintahan Daerah Kabupaten Simalungun, serta mengelola dan mengembangkan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi Satu Data dan sumber Informasi yang Akuntabel di Kabupaten Simalungun dalam Tugas Utama:

- **Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi .**
- **Memperkuat dan mengembangkan infrastruktur telekomunikasi dan informatika .**
- **Mengawasi dan mengendalikan ruang digital .**
- **Melindungi data pribadi dan kebebasan informasi .**

- **Mengelola komunikasi publik dan media .**
- **Meningkatkan literasi digital dan transformasi digital**

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan kendala yang dialami Kurangnya Pagu Anggaran yang diberikan oleh TAPD yang sangat di perlukan dan masi di butuhkan Tenaga IT dan Tenaga ahli dalam Bidang Komunikasi sbb:

1. Mendokumentasikan kegiatan yang menyangkut bidang Komunikasi dan Digitalisasi khususnya terkait data kepada seluruh OPD terkait.
2. Mengupayakan anggaran tersedia untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan ke depannya dengan memasukkannya ke dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja ke depannya;
3. Memaksimalkan tenaga IT dan Tenaga Ahli di bidang IT yang ada dan meningkatkan skill/keterampilannya melalui bimtek atau pelatihan;
4. Mengupayakan anggaran baik dari APBD maupun dana lainnya untuk kegiatan PBK;
5. Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan Media Online dan Cetak yang ada terkait Media (melaui MoU maupun kerjasama dalam Publikasi Media Online dan Cetak);
6. Penambahan pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memenuhi SDM yang mengerti akan IT.
7. Membuka ruang mediasi bagi OPD terkait dan Media untuk berkolaborasi

Besarnya anggaran yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan seluruh capaian kinerja adalah sebesar Rp **10,452,825,282.00**

Dari Rp. **10,452,825,282.00** yang telah dialokasikan sebesar Rp.10.114.294.599,- (96,76%) dengan rincian sebagai Berikut ;

1. Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota Rp.10.016.000, Realisasi Rp.8.764.000.
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp.1.385.104.800,Realisasi Rp.1.361.875.157 98.32%
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp.455.738.028 Realisasi Rp.418.123.917 91.75%
4. Pemeliharaan Barang milik Daerah Rp.226.720.000 Realisasi Rp.223.645.197 98.64%
5. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Rp.4.492.270.000. Realisasi Rp.4.467.776.308,- 99.45%
6. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Rp.817.500.000,-Realisasi Rp.811.015.000, 99.21%
7. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor Rp.61.815.500,-Realisasi Rp.51.035.000,- 82.56%

8. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Rp.42.780.000,-
Realisasi Rp. 41.780.000,- 97.66%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1. Latar Belakang.....	
1.3. Landasan Hukum.....	9
1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi	10
1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun 2021-2026.....	
a. Struktur Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun Tahun 2024.....	
b. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun Tahun 2024	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
a. Capaian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun.....	
1. Pengukuran Kinerja.....	
2. Analisis Capaian Kinerja.....	26
3. Realisasi Anggaran	
BAB IV PENUTUP	41
LAMPIRAN.....	42
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
Lampiran 2. Piagam Penghargaan Pada Tahun 2024	
Lampiran 3. SK Tim Penyusun LAKIP	
Lampiran 4. SK Tim Pengumpul Data Capaian Kinerja	
Lampiran 5. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)	
Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja	
Pedoman Teknis Perencanaan	
Rencana Aksi	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun Tahun 2021 – 2026.....	12
Tabel 2.	Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun.....	13
Tabel 3.	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun.....	13
Tabel 4.	Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian sasaran Tahun 2024	14
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun Tahun 2024	15
Tabel 6.	Hasil Pengukuran atas Capaian Kinerja Tahun 2024	17
Tabel 7.	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024	18
Tabel 8.	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024	20
Tabel 9.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 dan Target Akhir yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun	21
Tabel 10.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional	21
Tabel 11.	Analisi Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Sasaran Strategis 1 serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	22
Tabel 12.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 1.....	23
Tabel 13.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis 1.....	23
Tabel 14.	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024	24
Tabel 15.	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024.....	24
Tabel 16.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024 dan Target Akhir yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun	26
Tabel 17.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional	27
Tabel 18.	Analisi Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Sasaran Strategis 2 serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	27
Tabel 19.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 2	28
Tabel 20.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu unit kerja Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Komunikasi dan Informatika, dimana sebagai unit kerja yang semua penggunaan dananya bersumber dari APBD harus dipertanggung jawabkan kembali kepada masyarakat melalui penyusunan dan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun Tahun 2024 mempedomani Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Sebagai penjabaran visi dan misi pemerintah Kabupaten Simalungun;
4. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas SKPD perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang;
5. Untuk memberikan gambaran pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

1.3. Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tetang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah.

1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun, susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun merupakan unit kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun.

2. Tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun memiliki tugas yaitu : membantu Bupati melaksanakan urusan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah; dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun mempunyai fungsi :

1. Menyusun kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Membina dan melaksanakan tugas di bidang Komunikasi dan Informatika;
4. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari

- a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Program /Keuangan
- c. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi:
 - 1) Seksi Pusat Informasi Publik
 - 2) Seksi Pelayanan E-Governance, Standarisasi dan Aplikasi
 - 3) Seksi Pemberdayaan dan Telematika
- d. Bidang Komunikasi publik, membawahi:
 - 1) Seksi Komunikasi Sosial

- 2) Seksi Penerbitan dan Publikasi dan Pameran
- 3) Seksi Penyiaran
- e. Bidang Informasi Publik:
 - 1) Seksi Pos dan Telekomunikasi
 - 2) Seksi Pengkajian/Pengolahan Analisa Data dan Informasi
 - 3) Seksi Bina Pemberdayaan Media Mas
- f. Bidang Statistik dan Persandian:
 - 1) Pranata Humas Ahli Muda
 - 2) Pranata Humas Ahli Muda
 - 3) Pranata Humas Ahli Muda

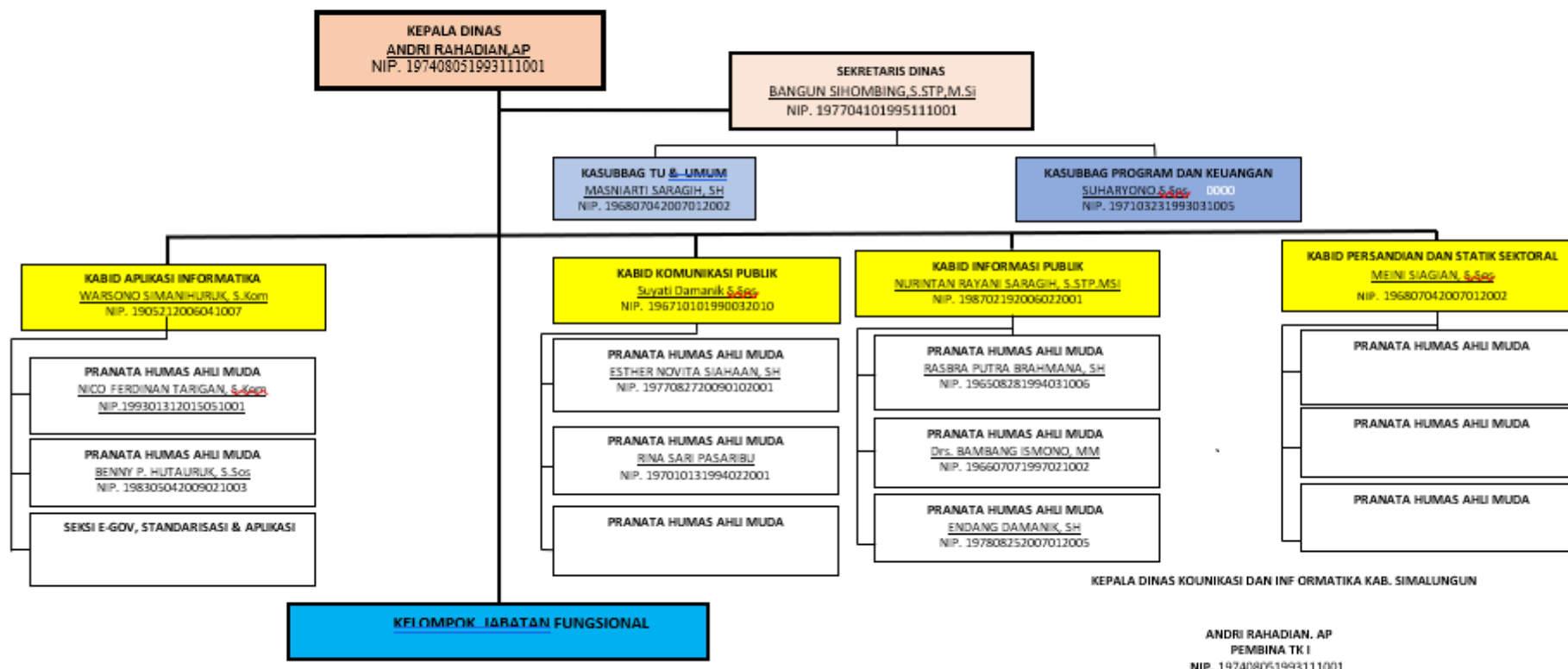
Gambar Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada gambar 2.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KODE POS 21162

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024



1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah

Isu strategis yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam gambar dibawah ini :

Rumusan Masalah	Isu Strategis
1. Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil dan professional di bidang teknologi dan informasi Kurangnya kesempatan kerja 2. Kurangnya pengintegrasian sistem informasi dan database OPD Kesenjangan upah 3. Kurangnya Pemberdayaan Potensi Komunikasi Masyarakat 4. Masih belum optimalnya penggunaan <i>e-government</i> untuk Pelayanan masyarakat yang di kelola oleh OPD 5. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK serta belum terintegrasi atau masih terpecah di masing-masing OPD yang melakukan fungsi pelayanan publik	1. Belum optimalnya kuantitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan unit kerja; 2. Masih adanya penempatan SDM yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian. 3. Belum optimalnya pusat data (<i>data center</i>) 4. Belum maksimalnya sosialisasi manfaat pengembangan kelompok masyarakat 5. Masih rendahnya SDM di organisasi dan TUPOKSI Kominfo. 6. Peningkatan pengembangan SDM dan server dalam pengembangan aplikasi pelayanan masih minim.

Dengan permasalahan yang diidentifikasi tersebut menjadi hambatan dan kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika yang berdampak terhadap pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika. Identifikasi permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. SDM sangat di butuhkan utk menunjang kelangsungan kegiatan dan program yang telah di rencanakan. Dan pada akhirnya Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi *Leadership* bagi OPD dan di Kabupaten Simalungun.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun 2021-2026

Reencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan tahapan penting dalam manajemen modern, demikian juga dengan manajemen pemerintahan, karena perencanaan dalam pemerintahan berfungsi untuk memberikan arah tujuan yang ingin dicapai dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam prosesnya perencanaan melingkupi seluruh elemen manajemen berupa organizing, actuating maupun controlling, sehingga perencanaan dijadikan alat ukur untuk evaluasi keberhasilan dan penyempurnaan dari kegagalan masing-masing indikator tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan dengan membandingkan perencanaan dan hasil yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Simalungun 2021-2026 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

“RAKYAT HARUS SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 10 (sepuluh) misi pembangunan Kabupaten Simalungun sebagai berikut.

1. Pemulihan Ekonomi
2. Pemulihan Kesehatan
3. Penerapan GCG (Good and Clear Government)
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Peningkatan Pertanian dan Sistem Agribisnis
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millennial
9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)
10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Perencanaan kinerja merupakan dokumentasi rencana yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Melalui perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun dapat menyelaraskan visi dan misinya sesuai dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapinya dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu unit kerja Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Komunikasi dan Informatika. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kominfo Kabupaten Simalungun berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu RPJMD Dinas Kominfo Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, serta Penetapan Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2024.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun Tahun 2024.

Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun berpedoman pada RPJMD Dinas Kominfo Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 dengan visi :

“Terwujudnya Masyarakat dan Daerah Kabupaten Simalungun yang Makmur Perekonomian, Adil, Nyaman, Taqwa, Aman dan Berbudaya” (MANTAB).

Pernyataan visi tersebut dilandasi pemahaman bahwa pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan :

- Masyarakat Informasi
Artinya :
 1. Masyarakat mampu memilih, memilah dan memanfaatkan informasi untuk meningkatkan perubahan sosial dan pembangunan ekonomi
 2. Masyarakat yang memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap informasi

3. Memiliki akses informasi sampai ke rumah-rumah penduduk dan membuka akses informasi hingga ke daerah yang sulit terjangkau.
- Sejahtera dan Berbudaya

Artinya :

Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam hubungan ini mempunyai tanggung jawab untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam sektor komunikasi dan informatika, sehingga masyarakat memiliki budaya yang komunikatif dan informatif, dengan mendasarkan pada pengelolaan data dan informasi yang akurat dan terkini dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan budaya.

Visi Dinas Kominfo Kabupaten Simalungun tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) misi yaitu:

1. peningkatan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat, lembaga media massa, dokumentasi dan monitoring pendapat umum
2. Peningkatan pelayanan informasi multimedia kepada publik, yang terprogram, akuntabel dan didukung pemberdayaan telematika
3. Peningkatan kualitas pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi dan komunikasi tradisional, cetak dan modern

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika Pemerintah dan masyarakat, lembaga media massa, dokumentasi dan monitoring pendapat umum
2. Terwujudnya pelayanan informasi multimedia kepada publik yang didukung pemberdayaan telematika.
3. Meningkatnya sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang berkualitas

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem informasi, komunikasi dan media massa
 - a. Peningkatan sistem komunikasi antar SKPD
 - b. Adanya jaringan radio komunikasi
 - c. Adanya aplikasi telematika
 - d. Peningkatan Sarana Penyampaian Informasi
2. Meningkatkan penyebaran Teknologi Informasi dan dan Komunikasi (TIK) kepada masyarakat.
 - a. Peningkatan jumlah jaringan komunikasi.
 - b. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun Tahun 2020 - 2024

Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Simalungun diharapkan dapat menjadi tolok ukur efektivitas dan standar akuntabilitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian rencana kerja, Sebagai Berikut.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya Peningkatan pelayanan administrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Peningkatan pelayanan administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
3	Tersedianya Pencapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89,38%	93%	93%	97%	100%

4	Tersedianya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tercapainya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tercapainya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Tercapainya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	0	0	100%	100%	100%
7	Tercapainya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	100%	100%	100%

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Simalungun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Tersedianya Peningkatan pelayanan administrasi Perangkat Daerah	Peningkatan pelayanan administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Peningkatan pelayanan administrasi Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Tersedianya Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Ketenagakerjaan
3	Tersedianya Pencapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

		Daerah			
4	Tersedianya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Tercapainya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Tercapainya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Tercapainya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Tercapainya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun

Misi I : Pemulihan Ekonomi

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
----	---------	----------	----------------

1	Peningkatan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat, lembaga media massa, dokumentasi dan monitoring pendapat umum	Terwujudnya kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika Pemerintah dan masyarakat, lembaga media massa, dokumentasi dan monitoring pendapat umum	1. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika Pemerintah dan masyarakat, lembaga media massa, dokumentasi dan monitoring pendapat umum
2	Peningkatan pelayanan informasi multimedia kepada publik, yang terprogram, akuntabel dan didukung pemberdayaan telematika	Terwujudnya kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika Pemerintah dan masyarakat, lembaga media massa, dokumentasi dan monitoring pendapat umum	Meningkatnya sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang berkualitas
3	Peningkatan kualitas pemerataan akses informasi dan dan pemanfaatan jaringan media informasi dan komunikasi tradisional, cetak dan modern	Meningkatnya sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang berkualitas	Terwujudnya sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang berkualitas

Misi III : Penerapan GCG (Good and Clear Government)

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya kualitas layanan dan inovasi (10)	Optimalisasi teknologi informasi dalam implementasi reformasi	Meningkatnya sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang berkualitas
			Meningkatnya kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika Pemerintah dan masyarakat, lembaga media massa, dokumentasi dan monitoring pendapat umum
			Meningkatnya sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang berkualitas

2.1.3. Struktur Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Simalungun maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN
Terlaksananya kegiatan yang mengacu pada Rencana Komunikasi dan informatika Daerah	Program : Perencanaan Komunikasi dan informatika Kegiatan : Penyusunan Rencana Komunikasi dan informatika
Terpenuhinya kualitas dan kompetensi Komunikasi dan informatika yang sesuai Peraturan	Program :Pelatihan dan Sosialisasi StatistikSektoral dan Jaring keamanan Persandian Sosialisasi PPID,Kerjasama dengan Media Mitra Kemasyarakatan

2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Simalungun adalah sebagai berikut

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komuniikasi dan Informatika Kab. Simalungun Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi Perangkat Daerah	100%
2	Terlaksananya Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	12 Dokumen

3	Terlaksananya Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97%
4	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%
5	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%
6	Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	100%
7	Terlaksananya Peningkatan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%

No	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.314.694.100
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 455.738.028
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 232.560.000
4	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp. 2.707.720.000
5	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 817.500.000.-
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL/ Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral	Rp. 93.620.200,-
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMAS	Rp.42.780.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya

3.1. Capaian dan Pengukuran Kinerja

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Capaian kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan penilaian kinerja ditetapkan suatu penilaian skala pengukuran kinerja sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Pengukuran atas Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis 1				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Peningkatan pelayanan administrasi Perangkat Daerah	100 %	98.32 %	98.32 %
Sasaran Strategis 2				
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	91.75%	91.75%
Sasaran Strategis 3				
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93%	98.64%	98.64%
Sasaran Strategis 4				
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tersedianya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	99,11%	99,11%
Sasaran Strategis 5				

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tercapainya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,21%	99,21%
Sasaran Strategis 6				
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tercapainya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	100%	82,56%	82,56%
Sasaran Strategis 7				
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tercapainya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	97,66%	97,66%

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Terlaksananya Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator 1 : Persentase Peningkatan pelayanan administrasi Perangkat Daerah

Tabel 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlaksananya Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi Perangkat Daerah	100 %	98.32 %	98.32 %

Dokumen Rencana Kerja Daerah Kabupaten Simalungun disusun untuk memberikan berbagai informasi Dinas Kominfo yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan Publikasi Media di Kabupaten Simalungun.

Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan informatika telah melakukan penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Tahun 2021-2026. Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen yang menyangkut data bidang Publikasi media dan SPBE khususnya untuk Kabupaten

Simalungun. Nantinya diharapkan seluruh program/kegiatan Dinas Kominfo Kab Simalungun mengacu kepada RTKD (Rencana Tenaga Kerja Daerah) ini.

Untuk mendapatkan penilaian realisasi dari indikator kinerja dengan menggunakan rumus jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD : jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten Simalungun. Tahun 2024 jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan mengacu ke RTKD sebanyak 6 kegiatan sedangkan jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten sebanyak 14 kegiatan dikali 100 % ($6 : 14 \times 100\% = 64,29\%$). Sumber data berasal dari Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun yaitu dari Rencana Kerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Tabel 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terlaksananya Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100 %	98.32 %	98.32 %

Terlaksananya kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja untuk tahun 2021-2023 realisasinya 0 dikarenakan sesuai dengan Renstra Dinas komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 bahwa program perencanaan ditargetkan dilaksanakan pada tahun 2023.

Tabel 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 dengan Target Akhir yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Terlaksananya Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi administrasi Perangkat Daerah	98.32 %	100 %	98.32 %

Melihat tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun capaian yang diperoleh untuk sasaran strategis terlaksananya kegiatan yang mengacu pada rencana kerja dengan indikator kinerjanya persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada

rencana kegiatan kerja menunjukkan angka yang cukup (sesuai target). Hal ini terjadi disebutkan sebelumnya bahwa pada saat penyusunan Renstra, telah memiliki target berdasarkan pengalaman di tahun 2024. Untuk tahun 2025, Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah ini direncanakan akan dievaluasi kembali karena akan disesuaikan dengan visi dan misi bupati terpilih.

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Terlaksananya Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Publik	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi Perangkat Daerah Publik	98.32 %	100%	98.32 %

Untuk indikator kinerja persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada rencana Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik daerah realisasi kinerja 64,29% sedangkan untuk target standar nasional 65%. Ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun untuk indikator tersebut hampir memenuhi standar nasional. Keberhasilan ini disebabkan kerjasama yang baik antara Dinas

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota	Capaian (%)
-------------------	-------------------	------------------------------	--	-------------

			Lainnya	
(1)	(2)	(3)	4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Terlaksananya Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Publik	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi Perangkat Daerah Publik	98.32 %	0%	98.32 %

Untuk indikator kinerja persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada rencana Tercapainya kegiatan yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

kerja daerah realisasi kinerja 98,32% sedangkan untuk target standar nasional 0%. Ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Terlaksananya Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Publik	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi Perangkat Daerah Publik	98.32 %	0%	98.32 %

Untuk indikator kinerja persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada rencana tenaga kerja daerah realisasi kinerja 64,29% sedangkan untuk target standar nasional 65%. Ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun untuk indikator tersebut hampir memenuhi standar nasional. Keberhasilan ini disebabkan kerjasama yang baik antara Dinas Ketenagakerjaan dengan stakeholder terkait dalam mendukung pemenuhan data dan penentuan kebijakan bidang ketenagakerjaan ke depannya. Penyusunan dokumen untuk Rencana Tenaga Kerja ini dibantu oleh OPD dan instansi/lembaga terkait dengan pembentukan SK Tim yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Simalungun. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika diupayakan mengacu pada kebijakan yang ada dalam Dokumen RTKD yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kualitas para pencari kerja sehingga diterima/dapat bersaing di dunia kerja sehingga angka pengangguran berkurang, terbukanya lapangan kerja baru, tingginya minat

masyarakat untuk menjadi wira usaha baru, kondusifnya hubungan industrial, meningkatnya kesejahteraan pekerja dan kenyamanan pekerja dalam bekerja yang mengakibatkan tingginya angka produktivitas dan produksi.

Kabupaten Simalungun untuk indikator tersebut hampir memenuhi standar nasional. Keberhasilan ini disebabkan kerjasama yang baik antara Dinas Ketenagakerjaan dengan stakeholder terkait dalam mendukung pemenuhan data dan penentuan kebijakan bidang ketenagakerjaan ke depannya. Penyusunan dokumen untuk Rencana Tenaga Kerja ini dibantu oleh OPD dan instansi/lembaga terkait dengan pembentukan SK Tim yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Simalungun. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika diupayakan mengacu pada kebijakan yang ada dalam Dokumen RTKD yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan Publikasi media dan SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik)

dengan stakeholder terkait dalam mendukung pemenuhan data dan penentuan kebijakan bidang keterbukaan Informasi ke depannya. Penyusunan dokumen untuk Rencana Kerja ini dibantu oleh OPD dan instansi/lembaga terkait dengan pembentukan SK Tim yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Simalungun. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika diupayakan mengacu pada kebijakan yang ada dalam Dokumen RTKD yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kualitas Publikasi Media Online dan Media Sosial lainnya. Konten Kreator yang di motori oleh Tenaga IT dan Tenaga Ahli di bidang IT sehingga Publikasi media dan penyebaran informasi atau pesan kepada khalayak luas melalui berbagai saluran media, baik cetak maupun elektronik, untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah penjelasan lebih rinci:

- **Penyebaran Informasi:**

Publikasi media bertujuan untuk menyebarkan informasi, pesan, atau ide kepada publik.

- □ **Saluran Media:**

Informasi disebarkan melalui berbagai media, seperti media cetak (koran, majalah, poster, spanduk) dan media elektronik (radio, televisi, internet, media sosial).

- □ **Tujuan Tertentu:**

Publikasi media seringkali dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti promosi produk, kampanye sosial, atau pengumuman.

- □ **Contoh:**

Contoh publikasi media antara lain iklan di koran, siaran pers di televisi, postingan di media sosial, atau brosur yang dibagikan.

- □ **Fungsi:**

Media publikasi memiliki fungsi yang penting dalam menyampaikan informasi, membangun citra, dan mempengaruhi opini publik.

□ □ **Contoh Media Publikasi:**

- **Media Cetak:** Koran, majalah, poster, spanduk, brosur.
- □ **Media Elektronik:** Radio, televisi, internet, media sosial.
- □ **Media Visual:** Video, gambar, infografis.
- □ **Media Audio:** Audio, podcast.

Media publikasi merupakan sebuah **sarana promosi yang efektif dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat luas, baik dalam bentuk media (visual) maupun bentuk multimedia (audio dan visual)**

Tabel 5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Sasaran Strategis 1 serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terlaksananya Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Publik	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi Perangkat Daerah Publik	100 %	98.32 %	98.32 %	Capain Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Publik telah tercapai sesuai dengan realisasi dan target program kerja .	Dokumen RTKD disusun sebagai acuan Dinas Komunikasi dan informasi dalam melaksanakan program dan kegiatannya .

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 12. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggara			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terlaksananya Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Publik	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi Perangkat Daerah Publik	100 %	98.32 %	98.32 %	1.385.104.800	1.361.875.157	98.32%	0.0%

Dari tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis 1 (satu) terlaksananya kegiatan yang mengacu pada Rencana Teana Kerja Daerah sebesar 99,45% mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 64,29% dengan tingkat efisiensi 1.463,6%.

Keberhasilan efisiensi penggunaan sumber daya salah satunya disebabkan perumusan perencanaan yang tepat. Efisiensi sumber daya adalah praktek memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Efisiensi sumber daya dapat mendorong produktivitas. Perencanaan merupakan titik awal untuk peningkatan efisiensi yang signifikan.

Tabel 7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Terlaksananya Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Publik	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi Perangkat Daerah Publik	98.32 %	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Kegiatan : Penyusunan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase kegiatan yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Persentase kegiatan yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi (RTK)Jumlah Dokumen RTK yang disusun	100 % 100%	Menunjang	Penyusunan dokumen rencana tenaga kerja dilakukan untuk mendukung program dan kegiatan yang akan dilaksanakan karena dokumen tersebut adalah renstranya bidang ketenagakerjaan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan terkait publikasi dan media

Sasaran Strategis 2 : Terlaksananya Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator 2 : Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 14. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlaksananya Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	91.75%	91.75%

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) adalah proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan komunikasi publik, serta pengelolaan informasi publik untuk mendukung kegiatan pemerintah dan pelayanan publik, termasuk layanan informasi publik, hubungan media, dan manajemen krisis.

Tujuan PIKP:

- Meningkatkan kualitas komunikasi publik:

PIKP bertujuan untuk memastikan pesan yang disampaikan pemerintah jelas, akurat, dan relevan bagi masyarakat.

- Meningkatkan keterbukaan informasi publik:

PIKP memastikan informasi publik tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.

- Meningkatkan partisipasi masyarakat:

PIKP mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik.

- Meningkatkan citra pemerintah:

PIKP membantu pemerintah membangun citra yang positif dan kredibel di mata masyarakat.

•

Fokus Utama PIKP:

- Pengelolaan Opini dan Informasi Publik:

Mengelola opini dan informasi publik, termasuk pemantauan isu publik, pengumpulan pendapat masyarakat, dan pengelolaan aduan masyarakat.

- Pengelolaan Komunikasi Publik:

Merencanakan dan melaksanakan kampanye komunikasi publik, pengelolaan konten media sosial, dan manajemen krisis.

- Layanan Informasi Publik:

Menyediakan informasi publik yang akurat, mudah diakses, dan relevan bagi masyarakat.

- Hubungan Media:

Menjalin hubungan yang baik dengan media massa dan media sosial, serta mengelola liputan media terkait pemerintah.

•

Contoh Kegiatan PIKP:

- Pembuatan konten edukasi: Menyediakan informasi yang mudah dipahami dan relevan bagi masyarakat.

- Pelaksanaan sosialisasi program pemerintah: Menginformasikan program pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai media.
- Penanganan krisis komunikasi: Mengelola komunikasi selama terjadi krisis, seperti bencana alam atau wabah penyakit.
- Pelayanan informasi publik: Menjawab pertanyaan masyarakat terkait program dan kebijakan pemerintah.
- Monitoring media: Memantau pemberitaan media terkait pemerintah dan isu-isu penting.

Peran PIKP di Lingkungan Pemerintah:

- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo):

Bidang PIKP seringkali menjadi bagian dari Diskominfo, yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik di tingkat pemerintah daerah.

- Unit Kerja Lain:

PIKP juga dapat dilakukan oleh unit kerja lain di lingkungan pemerintah, seperti unit humas atau unit yang menangani layanan informasi publik.

Kesimpulan:

PIKP adalah proses yang penting untuk mendukung kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Dengan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang efektif, pemerintah dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, meningkatkan keterbukaan informasi, dan mencapai tujuan pembangunan.



Tabel 15. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terlaksananya Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77,33%	53,81%	87.83%	100 %	91,75%	91.75%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan gambaran bahwa kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik mengalami peningkatan dan ini didukung oleh kinerja yang telah ditetapkan dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami fluktuasi yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena di tahun 2021 dampak wabah covid 19 adanya pengurangan anggaran.

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024 dengan Target Akhir yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Terlaksananya Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,75%	100 %	91,75%

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa tingkat kemajuan telah melebihi jauh dari apa yang ditargetkan di tahun 2024 dan diakhir rencana strategis. Hal ini terjadi karena kerja keras dan kerjasama semua pihak dalam upaya Publikasi dan penyebaran Informasi di Kabupaten Simalungun. Kerjasama dengan OPD, instansi/lembaga terkait maupun dengan semua Media yang ada di wilayah Kabupaten Simalungun diharapkan mampu untuk meningkatkan Mutu Berita dan Media yang Transparan.

. Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Terlaksananya Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,75%	0%	91,75%

Realisasi kinerja untuk indikator Persentase kegiatan yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Indikator persentase kegiatan yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) mengukur proporsi kegiatan yang didasarkan pada PIKP dari total kegiatan yang dilakukan, misalnya persentase kegiatan sosialisasi yang sesuai PIKP dari total kegiatan sosialisasi. Mengalami kenaikan karena adanya kerja sama dengan Media Lokal dan Nasional. **Persentase kegiatan penyediaan informasi yang sesuai dengan PIKP:** Misalnya, dari 50 jenis informasi yang disajikan, 40 jenis informasi disajikan sesuai dengan PIKP, maka indikatornya adalah 80%

Tabel 18. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Sasaran Strategis 2 serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terlaksananya Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.45 %	91,75%	91,75%	Capaian Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah tercapai sesuai dengan realisasi dan target program kerja .	1) Evaluasi Kinerja: Indikator ini membantu mengevaluasi kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik, apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 2) ☐ ☐ Pengambilan Keputusan: Informasi dari indikator ini dapat

						digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik di masa depan. 3) ☐ ☐ Pelaporan: Indikator ini dapat digunakan sebagai bagian dari laporan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang berkompeten
--	--	--	--	--	--	--

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 19. Analisis atas penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terlaksananya Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	91,75%	91,75%	455.738.028	418.123.917	91,75%	0.0%

Dari tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis 2 (dua) terpenuhinya kualitas dan kompetensi Publikasi dan Media Konten creator yang sesuai dengan standar penyiaran dan indikatornya persentase sebesar 99.45% mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 97,63% dengan tingkat efisiensi 72.5%.

Efisiensi Secara singkat, manfaat dan sasaran Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

- Memperjelas tentang informasi program.
- Menciptakan kesepakatan untuk menghindari kesalahan interpretasi dan perbedaan pendapat selama pelaksanaan program/kegiatan.
- Membangun dasar bagi pemantauan dan evaluasi.
- Untuk mengenalkan dan memotivasi pelaksana program dalam pencapaian hasil.
- Untuk mengkomunikasikan dan melaporkan hasil yang telah dicapai kepada stakeholders

Tabel 20. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Terlaksananya Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,75%	Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan :	Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,75%	Menunjang	Dengan adanya program dan kegiatan ini maka diharapkan Publikasi media dan Kerjasama dengan media

			Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,75%		baik dan online dapat meningkatkan kualitas berta.
--	--	--	--	---	--------	--	--

Sasaran Strategis 3 : Terlaksananya Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator 3 : Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 14. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlaksananya Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97%	98.64%	98.64%

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) adalah proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan komunikasi publik, serta pengelolaan informasi publik untuk mendukung kegiatan pemerintah dan pelayanan publik, termasuk layanan informasi publik, hubungan media, dan manajemen krisis.

Tujuan PIKP:

- Meningkatkan kualitas komunikasi publik:

PIKP bertujuan untuk memastikan pesan yang disampaikan pemerintah jelas, akurat, dan relevan bagi masyarakat.

- Meningkatkan keterbukaan informasi publik:

PIKP memastikan informasi publik tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.

- Meningkatkan partisipasi masyarakat:

PIKP mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik.

- Meningkatkan citra pemerintah:

PIKP membantu pemerintah membangun citra yang positif dan kredibel di mata masyarakat.

•

Fokus Utama PIKP:

- Pengelolaan Opini dan Informasi Publik:

Mengelola opini dan informasi publik, termasuk pemantauan isu publik, pengumpulan pendapat masyarakat, dan pengelolaan aduan masyarakat.

- Pengelolaan Komunikasi Publik:

Merencanakan dan melaksanakan kampanye komunikasi publik, pengelolaan konten media sosial, dan manajemen krisis.

- Layanan Informasi Publik:

Menyediakan informasi publik yang akurat, mudah diakses, dan relevan bagi masyarakat.

- Hubungan Media:

Menjalin hubungan yang baik dengan media massa dan media sosial, serta mengelola liputan media terkait pemerintah.

-

Contoh Kegiatan PIKP:

- Pembuatan konten edukasi: Menyediakan informasi yang mudah dipahami dan relevan bagi masyarakat.
- Pelaksanaan sosialisasi program pemerintah: Menginformasikan program pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai media.
- Penanganan krisis komunikasi: Mengelola komunikasi selama terjadi krisis, seperti bencana alam atau wabah penyakit.
- Pelayanan informasi publik: Menjawab pertanyaan masyarakat terkait program dan kebijakan pemerintah.
- Monitoring media: Memantau pemberitaan media terkait pemerintah dan isu-isu penting.

-

Peran PIKP di Lingkungan Pemerintah:

- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo):

Bidang PIKP seringkali menjadi bagian dari Diskominfo, yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik di tingkat pemerintah daerah.

- Unit Kerja Lain:

PIKP juga dapat dilakukan oleh unit kerja lain di lingkungan pemerintah, seperti unit humas atau unit yang menangani layanan informasi publik.

-

Kesimpulan:

PIKP adalah proses yang penting untuk mendukung kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Dengan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang efektif, pemerintah dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, meningkatkan keterbukaan informasi, dan mencapai tujuan pembangunan.

Tabel 15. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terlaksananya Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60,40%	96,60%	94.41%	99.45 %	98,64%	98,64%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan gambaran bahwa kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik mengalami peningkatan dan ini didukung oleh kinerja yang telah ditetapkan dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami fluktuasi yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena di tahun 2021 dampak wabah covid 19 adanya pengurangan anggaran.

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2024 dengan Target Akhir yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Terlaksananya Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,64%	100 %	98.64 %

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa tingkat kemajuan telah melebihi jauh dari apa yang ditargetkan di tahun 2024 dan diakhir rencana strategis. Hal ini terjadi karena kerja keras dan kerjasama semua pihak dalam upaya Publikasi dan penyebaran Informasi di Kabupaten Simalungun. Kerjasama dengan OPD, instansi/lembaga terkait maupun dengan semua Media

yang ada di wilayah Kabupaten Simalungun diharapkan mampu untuk meningkatkan Mutu Berita dan Media yang Transparan.

. Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Terlaksananya Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,64%	0%	98,64%

Realisasi kinerja untuk indikator Persentase kegiatan yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Indikator persentase kegiatan yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) mengukur proporsi kegiatan yang didasarkan pada PIKP dari total kegiatan yang dilakukan, misalnya persentase kegiatan sosialisasi yang sesuai PIKP dari total kegiatan sosialisasi. Mengalami kenaikan karena adanya kerja sama dengan Media Lokal dan Nasional. **Persentase kegiatan penyediaan informasi yang sesuai dengan PIKP:** Misalnya, dari 50 jenis informasi yang disajikan, 40 jenis informasi disajikan sesuai dengan PIKP, maka indikatornya adalah 80%

Tabel 18. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Sasaran Strategis 3 serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terlaksananya Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.45 %	98,64%	98,64%	Capain Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah tercapai sesuai dengan realisasi dan target program kerja .	4) Evaluasi Kinerja: Indikator ini membantu mengevaluasi kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik, apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 5) ☐ ☐ Pengambilan Keputusan:

						Informasi dari indikator ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik di masa depan. 6) ☐ ☐ Pelaporan: Indikator ini dapat digunakan sebagai bagian dari laporan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang berkompeten
--	--	--	--	--	--	---

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 19. Analisis atas penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 3

Sasaran	Indikator	Kinerja	Anggaran	Efisiensi
---------	-----------	---------	----------	-----------

Strategis	Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terlaksananya Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.45 %	98,64%	98,64%	226.720.000	223.645.197	98.64 %	0.4%

Dari tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis 2 (dua) terpenuhinya kualitas dan kompetensi Publikasi dan Media Konten creator yang sesuai dengan standar penyiaran dan indikatornya persentase sebesar 99.45% mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 97,63% dengan tingkat efisiensi 72.5%.

Efisiensi Secara singkat, manfaat dan sasaran Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

- Memperjelas tentang informasi program.
- Menciptakan kesepakatan untuk menghindari kesalahan interpretasi dan perbedaan pendapat selama pelaksanaan program/kegiatan.
- Membangun dasar bagi pemantauan dan evaluasi.
- Untuk mengenalkan dan memotivasi pelaksana program dalam pencapaian hasil.
- Untuk mengkomunikasikan dan melaporkan hasil yang telah dicapai kepada stakeholders

Tabel 20. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Terlaksananya Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	98,64%	Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPem	98,64%	Menunjang	Dengan adanya program dan kegiatan ini maka diharapkan Publikasi

	Pemerintahan Daerah		Pemerintahan Daerah	erintahan Daerah	98,64%		media dan Kerjasama dengan media baik online dan cetak dapat meningkatkan kualitas berita.
			Kegiatan : Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Sasaran Strategis 4 :Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator 4 : Persentase Tersedianya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 14. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	99.45%	99.45%

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) adalah proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan komunikasi publik, serta pengelolaan informasi publik untuk mendukung kegiatan pemerintah dan pelayanan publik, termasuk layanan informasi publik, hubungan media, dan manajemen krisis.

Tujuan PIKP:

- Meningkatkan kualitas komunikasi publik:

PIKP bertujuan untuk memastikan pesan yang disampaikan pemerintah jelas, akurat, dan relevan bagi masyarakat.

- Meningkatkan keterbukaan informasi publik:

PIKP memastikan informasi publik tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.

- Meningkatkan partisipasi masyarakat:

PIKP mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik.

- Meningkatkan citra pemerintah:

PIKP membantu pemerintah membangun citra yang positif dan kredibel di mata masyarakat.

•

Fokus Utama PIKP:

- Pengelolaan Opini dan Informasi Publik:

Mengelola opini dan informasi publik, termasuk pemantauan isu publik, pengumpulan pendapat masyarakat, dan pengelolaan aduan masyarakat.

- Pengelolaan Komunikasi Publik:

Merencanakan dan melaksanakan kampanye komunikasi publik, pengelolaan konten media sosial, dan manajemen krisis.

- Layanan Informasi Publik:

Menyediakan informasi publik yang akurat, mudah diakses, dan relevan bagi masyarakat.

- Hubungan Media:

Menjalin hubungan yang baik dengan media massa dan media sosial, serta mengelola liputan media terkait pemerintah.

•

Contoh Kegiatan PIKP:

- Pembuatan konten edukasi: Menyediakan informasi yang mudah dipahami dan relevan bagi masyarakat.
- Pelaksanaan sosialisasi program pemerintah: Menginformasikan program pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai media.
- Penanganan krisis komunikasi: Mengelola komunikasi selama terjadi krisis, seperti bencana alam atau wabah penyakit.
- Pelayanan informasi publik: Menjawab pertanyaan masyarakat terkait program dan kebijakan pemerintah.
- Monitoring media: Memantau pemberitaan media terkait pemerintah dan isu-isu penting.

•

Peran PIKP di Lingkungan Pemerintah:

- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo):

Bidang PIKP seringkali menjadi bagian dari Diskominfo, yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik di tingkat pemerintah daerah.

- Unit Kerja Lain:

PIKP juga dapat dilakukan oleh unit kerja lain di lingkungan pemerintah, seperti unit humas atau unit yang menangani layanan informasi publik.

•

Kesimpulan:

PIKP adalah proses yang penting untuk mendukung kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Dengan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang efektif, pemerintah dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, meningkatkan keterbukaan informasi, dan mencapai tujuan pembangunan.

Tabel 15. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	77,33%	95,60%	97,31%	100%	99,45%	99,45%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan gambaran bahwa kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik mengalami peningkatan dan ini didukung oleh kinerja yang telah ditetapkan dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami fluktuasi yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena di tahun 2021 dampak wabah covid 19 adanya pengurangan anggaran.

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2024 dengan Target Akhir yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99,45%	100 %	99,45%

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa tingkat kemajuan telah melebihi jauh dari apa yang ditargetkan di tahun 2024 dan diakhir rencana strategis. Hal ini terjadi karena kerja keras dan kerjasama semua pihak dalam upaya Publikasi dan penyebaran Informasi di Kabupaten Simalungun. Kerjasama dengan OPD, instansi/lembaga terkait maupun dengan semua Media yang ada di wilayah Kabupaten Simalungun diharapkan mampu untuk meningkatkan Mutu Berita dan Media yang Transparan.

. Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99,45%	0%	99,45%

Realisasi kinerja untuk indikator Persentase kegiatan yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Indikator persentase kegiatan yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) mengukur proporsi kegiatan yang didasarkan pada PIKP dari total kegiatan yang dilakukan, misalnya persentase kegiatan sosialisasi yang sesuai PIKP dari total kegiatan sosialisasi. Mengalami kenaikan karena adanya kerja sama dengan Media Lokal dan Nasional. **Persentase kegiatan penyediaan informasi yang sesuai dengan PIKP:** Misalnya, dari 50 jenis informasi yang disajikan, 40 jenis informasi disajikan sesuai dengan PIKP, maka indikatornya adalah 80%

Tabel 18. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Sasaran Strategis 4 serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	100 %	99,45%	99,45%	Capain Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah tercapai	7) Evaluasi Kinerja: Indikator ini membantu mengevaluasi kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik, apakah sudah

a	Kabupaten/ Kota				sesuai dengan realisasi dan target program kerja .	sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 8) ☐ ☐ Pengambilan Keputusan: Informasi dari indikator ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik di masa depan. 9) ☐ ☐ Pelaporan: Indikator ini dapat digunakan sebagai bagian dari laporan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang berkompeten
---	--------------------	--	--	--	--	--

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 19. Analisis atas penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	99,45%	99,45%	4.492.270.000	4.467.776.308	99.45 %	0.0%

Dari tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis 2 (dua) terpenuhinya kualitas dan kompetensi Publikasi dan Media Konten creator yang sesuai dengan standar penyiaran dan indikatornya persentase sebesar 99.45% mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 97,63% dengan tingkat efisiensi 72.5%.

Efisiensi Secara singkat, manfaat dan sasaran Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

- Memperjelas tentang informasi program.
- Menciptakan kesepakatan untuk menghindari kesalahan interpretasi dan perbedaan pendapat selama pelaksanaan program/kegiatan.
- Membangun dasar bagi pemantauan dan evaluasi.
- Untuk mengenalkan dan memotivasi pelaksana program dalam pencapaian hasil.
- Untuk mengkomunikasikan dan melaporkan hasil yang telah dicapai kepada stakeholders

Tabel 20. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
-------------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------------	-------------	-----------------------------	----------

Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99,45%	Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Persentase Tersedianya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99,45%	Menunjang	Dengan adanya program dan kegiatan ini maka diharapkan Publikasi media dan Kerjasama dengan media baik online dan cetak dapat meningkatkan kwiltas berta.
--	---	--------	---	---	--------	-----------	---

Sasaran Strategis 5 : Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator 5 : Persentase Tercapainya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 14. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,21%	99,21%

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) adalah proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan komunikasi publik, serta pengelolaan informasi publik untuk mendukung kegiatan pemerintah dan pelayanan publik, termasuk layanan informasi publik, hubungan media, dan manajemen krisis.

Tujuan PIKP:

- Meningkatkan kualitas komunikasi publik:

PIKP bertujuan untuk memastikan pesan yang disampaikan pemerintah jelas, akurat, dan relevan bagi masyarakat.

- Meningkatkan keterbukaan informasi publik:

PIKP memastikan informasi publik tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.

- Meningkatkan partisipasi masyarakat:

PIKP mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik.

- Meningkatkan citra pemerintah:

PIKP membantu pemerintah membangun citra yang positif dan kredibel di mata masyarakat.

•

Fokus Utama PIKP:

- Pengelolaan Opini dan Informasi Publik:

Mengelola opini dan informasi publik, termasuk pemantauan isu publik, pengumpulan pendapat masyarakat, dan pengelolaan aduan masyarakat.

- Pengelolaan Komunikasi Publik:

Merencanakan dan melaksanakan kampanye komunikasi publik, pengelolaan konten media sosial, dan manajemen krisis.

- Layanan Informasi Publik:

Menyediakan informasi publik yang akurat, mudah diakses, dan relevan bagi masyarakat.

- Hubungan Media:

Menjalin hubungan yang baik dengan media massa dan media sosial, serta mengelola liputan media terkait pemerintah.

•

Contoh Kegiatan PIKP:

- Pembuatan konten edukasi: Menyediakan informasi yang mudah dipahami dan relevan bagi masyarakat.
- Pelaksanaan sosialisasi program pemerintah: Menginformasikan program pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai media.
- Penanganan krisis komunikasi: Mengelola komunikasi selama terjadi krisis, seperti bencana alam atau wabah penyakit.
- Pelayanan informasi publik: Menjawab pertanyaan masyarakat terkait program dan kebijakan pemerintah.
- Monitoring media: Memantau pemberitaan media terkait pemerintah dan isu-isu penting.

•

Peran PIKP di Lingkungan Pemerintah:

- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo):

Bidang PIKP seringkali menjadi bagian dari Diskominfo, yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik di tingkat pemerintah daerah.

- Unit Kerja Lain:

PIKP juga dapat dilakukan oleh unit kerja lain di lingkungan pemerintah, seperti unit humas atau unit yang menangani layanan informasi publik.

•

Kesimpulan:

PIKP adalah proses yang penting untuk mendukung kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Dengan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang efektif, pemerintah dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, meningkatkan keterbukaan informasi, dan mencapai tujuan pembangunan.

Tabel 15. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	67,62%	93,63%	97.31%	100%	99,94%	99,94%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan gambaran bahwa kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik mengalami peningkatan dan ini didukung oleh kinerja yang telah ditetapkan dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami fluktuasi yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena di tahun 2021 dampak wabah covid 19 adanya pengurangan anggaran.

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2024 dengan Target Akhir yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99,94%	100 %	99,94%

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa tingkat kemajuan telah melebihi jauh dari apa yang ditargetkan di tahun 2024 dan diakhir rencana strategis. Hal ini terjadi karena kerja keras dan kerjasama semua pihak dalam upaya Publikasi dan penyebaran Informasi di Kabupaten Simalungun. Kerjasama dengan OPD, instansi/lembaga terkait maupun dengan semua Media yang ada di wilayah Kabupaten Simalungun diharapkan mampu untuk meningkatkan Mutu Berita dan Media yang Transparan.

. Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99,94%	0%	99,94%

Realisasi kinerja untuk indikator Persentase kegiatan yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Indikator persentase kegiatan yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) mengukur proporsi kegiatan yang didasarkan pada PIKP dari total kegiatan yang dilakukan, misalnya persentase kegiatan sosialisasi yang sesuai PIKP dari total kegiatan sosialisasi. Mengalami kenaikan karena adanya kerja sama dengan Media Lokal dan Nasional. **Persentase kegiatan penyediaan informasi yang sesuai dengan PIKP:** Misalnya, dari 50 jenis informasi yang disajikan, 40 jenis informasi disajikan sesuai dengan PIKP, maka indikatornya adalah 80%

Tabel 18. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Sasaran Strategis 5 serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	99,94%	99,94%	Capain Peningkatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah tercapai sesuai dengan realisasi dan target program kerja .	10) Evaluasi Kinerja: Indikator ini membantu mengevaluasi kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik, apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 11) ☐ ☐ Pengambilan Keputusan: Informasi dari indikator ini dapat digunakan sebagai

						dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik di masa depan. 12) ☐ ☐ Pelaporan: Indikator ini dapat digunakan sebagai bagian dari laporan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang berkompeten
--	--	--	--	--	--	---

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 19. Analisis atas penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	99,94%	99,94%	817.500.000	811.015.000	99,94%	0.7%

Dari tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis 2 (dua) terpenuhinya kualitas dan kompetensi Publikasi dan Media Konten creator yang sesuai dengan standar penyiaran dan indikatornya persentase sebesar 99.45% mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 97,63% dengan tingkat efisiensi 72.5%.

Efisiensi Secara singkat, manfaat dan sasaran Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

- Memperjelas tentang informasi program.
- Menciptakan kesepakatan untuk menghindari kesalahan interpretasi dan perbedaan pendapat selama pelaksanaan program/kegiatan.
- Membangun dasar bagi pemantauan dan evaluasi.
- Untuk mengenalkan dan memotivasi pelaksana program dalam pencapaian hasil.
- Untuk mengkomunikasikan dan melaporkan hasil yang telah dicapai kepada stakeholders

Tabel 20. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99,94%	Peningkatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99,94%	Menunjang	Dengan adanya program dan kegiatan ini maka diharapkan Publikasi media dan Kerjasama dengan media baik online dan cetak dapat meningkatkan kwiltas berta.

Sasaran Strategis 6 : Terlaksananya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

Indikator 6 : Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

Tabel 14. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlaksananya Pencapaian Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Tercapainya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	100%	82.56%	82.56%

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) adalah proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan komunikasi publik, serta pengelolaan informasi publik untuk mendukung kegiatan pemerintah dan pelayanan publik, termasuk layanan informasi publik, hubungan media, dan manajemen krisis.

Tujuan PIKP:

- Meningkatkan kualitas komunikasi publik:

PIKP bertujuan untuk memastikan pesan yang disampaikan pemerintah jelas, akurat, dan relevan bagi masyarakat.

- Meningkatkan keterbukaan informasi publik:

PIKP memastikan informasi publik tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.

- Meningkatkan partisipasi masyarakat:

PIKP mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik.

- Meningkatkan citra pemerintah:

PIKP membantu pemerintah membangun citra yang positif dan kredibel di mata masyarakat.

•

Fokus Utama PIKP:

- Pengelolaan Opini dan Informasi Publik:

Mengelola opini dan informasi publik, termasuk pemantauan isu publik, pengumpulan pendapat masyarakat, dan pengelolaan aduan masyarakat.

- Pengelolaan Komunikasi Publik:

Merencanakan dan melaksanakan kampanye komunikasi publik, pengelolaan konten media sosial, dan manajemen krisis.

- Layanan Informasi Publik:

Menyediakan informasi publik yang akurat, mudah diakses, dan relevan bagi masyarakat.

- Hubungan Media:

Menjalin hubungan yang baik dengan media massa dan media sosial, serta mengelola liputan media terkait pemerintah.

•

Contoh Kegiatan PIKP:

- Pembuatan konten edukasi: Menyediakan informasi yang mudah dipahami dan relevan bagi masyarakat.
- Pelaksanaan sosialisasi program pemerintah: Menginformasikan program pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai media.
- Penanganan krisis komunikasi: Mengelola komunikasi selama terjadi krisis, seperti bencana alam atau wabah penyakit.
- Pelayanan informasi publik: Menjawab pertanyaan masyarakat terkait program dan kebijakan pemerintah.
- Monitoring media: Memantau pemberitaan media terkait pemerintah dan isu-isu penting.

•

Peran PIKP di Lingkungan Pemerintah:

- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo):

Bidang PIKP seringkali menjadi bagian dari Diskominfo, yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik di tingkat pemerintah daerah.

- Unit Kerja Lain:

PIKP juga dapat dilakukan oleh unit kerja lain di lingkungan pemerintah, seperti unit humas atau unit yang menangani layanan informasi publik.

•

Kesimpulan:

PIKP adalah proses yang penting untuk mendukung kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Dengan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang efektif, pemerintah dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, meningkatkan keterbukaan informasi, dan mencapai tujuan pembangunan.

Tabel 15. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terlaksananya Pencapaian Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	0	0	78.03%	100%	82,56%	82,56%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan gambaran bahwa kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik mengalami peningkatan dan ini didukung oleh kinerja yang telah ditetapkan dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami fluktuasi yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena di tahun 2021 dampak wabah covid 19 adanya pengurangan anggaran.

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2024 dengan Target Akhir yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Terlaksananya Pencapaian Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	82,56%	100 %	82,56%

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa tingkat kemajuan telah melebihi jauh dari apa yang ditargetkan di tahun 2024 dan diakhir rencana strategis. Hal ini terjadi karena kerja keras dan kerjasama semua pihak dalam upaya Publikasi dan penyebaran Informasi di Kabupaten Simalungun. Kerjasama dengan OPD, instansi/lembaga terkait maupun dengan semua Media yang ada di wilayah Kabupaten Simalungun diharapkan mampu untuk meningkatkan Mutu Berita dan Media yang Transparan.

. Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Terlaksananya Pencapaian Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	82,56%	0%	82,56%

Realisasi kinerja untuk indikator Persentase kegiatan yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Indikator persentase kegiatan yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) mengukur proporsi kegiatan yang didasarkan pada PIKP dari total kegiatan yang dilakukan, misalnya persentase kegiatan sosialisasi yang sesuai PIKP dari total kegiatan sosialisasi. Mengalami kenaikan karena adanya kerja sama dengan Media Lokal dan Nasional. **Persentase kegiatan penyediaan informasi yang sesuai dengan PIKP:** Misalnya, dari 50 jenis informasi yang disajikan, 40 jenis informasi disajikan sesuai dengan PIKP, maka indikatornya adalah 80%

Tabel 18. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Sasaran Strategis 6 serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terlaksananya Pencapaian Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	100 %	82,56%	82,56%	Pencapaian Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah telah tercapai sesuai dengan realisasi dan target program kerja .	13) Evaluasi Kinerja: Indikator ini membantu mengevaluasi kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik, apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 14) ☐ ☐ Pengambilan Keputusan: Informasi dari indikator ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan

						keputusan untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik di masa depan. 15) ☐ ☐ Pelaporan: Indikator ini dapat digunakan sebagai bagian dari laporan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang berkompeten
--	--	--	--	--	--	---

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 19. Analisis atas penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terlaksananya Pencapaian Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	100 %	82,56%	82,56%	61.815.000	51.035.000	82,56%	0.0%

Dari tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis 2 (dua) terpenuhinya kualitas dan kompetensi Publikasi dan Media Konten creator yang sesuai dengan standar penyiaran dan indikatornya persentase sebesar 99.45% mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 97,63% dengan tingkat efisiensi 72.5%.

Efisiensi Secara singkat, manfaat dan sasaran Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

- Memperjelas tentang informasi program.
- Menciptakan kesepakatan untuk menghindari kesalahan interpretasi dan perbedaan pendapat selama pelaksanaan program/kegiatan.
- Membangun dasar bagi pemantauan dan evaluasi.
- Untuk mengenalkan dan memotivasi pelaksana program dalam pencapaian hasil.
- Untuk mengkomunikasikan dan melaporkan hasil yang telah dicapai kepada stakeholders

Tabel 20. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis 6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Terlaksananya Pencapaian Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	99,94%	Peningkatan Pencapaian Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Persentase Pencapaian Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	82,56%	Menunjang	Dengan adanya program dan kegiatan ini maka diharapkan Publikasi media dan Kerjasama dengan media baik online dan cetak dapat meningkatkan kwiltas berta.
			Kegiatan : Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	82,56%		

Sasaran Strategis 7 : Terlaksananya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator 7 : Persentase Meningkatnya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 14. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 7 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlaksananya Peningkatan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	97.66%	97.66%

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) adalah proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan komunikasi publik, serta pengelolaan informasi publik untuk mendukung kegiatan pemerintah dan pelayanan publik, termasuk layanan informasi publik, hubungan media, dan manajemen krisis.

Tujuan PIKP:

- Meningkatkan kualitas komunikasi publik:

PIKP bertujuan untuk memastikan pesan yang disampaikan pemerintah jelas, akurat, dan relevan bagi masyarakat.

- Meningkatkan keterbukaan informasi publik:

PIKP memastikan informasi publik tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.

- Meningkatkan partisipasi masyarakat:

PIKP mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik.

- Meningkatkan citra pemerintah:

PIKP membantu pemerintah membangun citra yang positif dan kredibel di mata masyarakat.

•

Fokus Utama PIKP:

- Pengelolaan Opini dan Informasi Publik:

Mengelola opini dan informasi publik, termasuk pemantauan isu publik, pengumpulan pendapat masyarakat, dan pengelolaan aduan masyarakat.

- Pengelolaan Komunikasi Publik:

Merencanakan dan melaksanakan kampanye komunikasi publik, pengelolaan konten media sosial, dan manajemen krisis.

- Layanan Informasi Publik:

Menyediakan informasi publik yang akurat, mudah diakses, dan relevan bagi masyarakat.

- Hubungan Media:

Menjalin hubungan yang baik dengan media massa dan media sosial, serta mengelola liputan media terkait pemerintah.

•

Contoh Kegiatan PIKP:

- Pembuatan konten edukasi: Menyediakan informasi yang mudah dipahami dan relevan bagi masyarakat.
- Pelaksanaan sosialisasi program pemerintah: Menginformasikan program pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai media.
- Penanganan krisis komunikasi: Mengelola komunikasi selama terjadi krisis, seperti bencana alam atau wabah penyakit.
- Pelayanan informasi publik: Menjawab pertanyaan masyarakat terkait program dan kebijakan pemerintah.
- Monitoring media: Memantau pemberitaan media terkait pemerintah dan isu-isu penting.

•

Peran PIKP di Lingkungan Pemerintah:

- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo):

Bidang PIKP seringkali menjadi bagian dari Diskominfo, yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik di tingkat pemerintah daerah.

- Unit Kerja Lain:

PIKP juga dapat dilakukan oleh unit kerja lain di lingkungan pemerintah, seperti unit humas atau unit yang menangani layanan informasi publik.

•

Kesimpulan:

PIKP adalah proses yang penting untuk mendukung kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Dengan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang efektif, pemerintah dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, meningkatkan keterbukaan informasi, dan mencapai tujuan pembangunan.

Tabel 15. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7 tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terlaksananya Peningkatan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	73.06%	100%	97.66%	97.66%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan gambaran bahwa kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik mengalami peningkatan dan ini didukung oleh kinerja yang telah ditetapkan dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami fluktuasi yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena di tahun 2021 dampak wabah covid 19 adanya pengurangan anggaran.

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 7 Tahun 2024 dengan Target Akhir yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Terlaksananya Peningkatan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	97.66%	100 %	97.66%

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa tingkat kemajuan telah melebihi jauh dari apa yang ditargetkan di tahun 2024 dan diakhir rencana strategis. Hal ini terjadi karena kerja keras dan kerjasama semua pihak dalam upaya Publikasi dan penyebaran Informasi di Kabupaten Simalungun. Kerjasama dengan OPD, instansi/lembaga terkait maupun dengan semua Media

yang ada di wilayah Kabupaten Simalungun diharapkan mampu untuk meningkatkan Mutu Berita dan Media yang Transparan.

. Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 7 Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Terlaksananya Peningkatan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	97.66%	0%	97.66%

Realisasi kinerja untuk indikator Persentase kegiatan yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Indikator persentase kegiatan yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) mengukur proporsi kegiatan yang didasarkan pada PIKP dari total kegiatan yang dilakukan, misalnya persentase kegiatan sosialisasi yang sesuai PIKP dari total kegiatan sosialisasi. Mengalami kenaikan karena adanya kerja sama dengan Media Lokal dan Nasional. **Persentase kegiatan penyediaan informasi yang sesuai dengan PIKP:** Misalnya, dari 50 jenis informasi yang disajikan, 40 jenis informasi disajikan sesuai dengan PIKP, maka indikatornya adalah 80%

Tabel 18. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Sasaran Strategis 7 serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terlaksananya Peningkatan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	97.66%	97.66%	Peningkatan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah tercapai sesuai dengan realisasi dan target program kerja	16) Evaluasi Kinerja: Indikator ini membantu mengevaluasi kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik, apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah

a	Kota					ditetapkan. 17) ☐ ☐ Pengambilan Keputusan: Informasi dari indikator ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik di masa depan. 18) ☐ ☐ Pelaporan: Indikator ini dapat digunakan sebagai bagian dari laporan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang berkompeten
---	------	--	--	--	--	---

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 19. Analisis atas penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terlaksananya Peningkatan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	97.66%	97.66%	42.780.000	41.780.000	97.66%	0.0%

Dari tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis 2 (dua) terpenuhinya kualitas dan kompetensi Publikasi dan Media Konten creator yang sesuai dengan standar penyiaran dan indikatornya persentase sebesar 99.45% mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 97,63% dengan tingkat efisiensi 72.5%.

Efisiensi Secara singkat, manfaat dan sasaran Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

- Memperjelas tentang informasi program.
- Menciptakan kesepakatan untuk menghindari kesalahan interpretasi dan perbedaan pendapat selama pelaksanaan program/kegiatan.
- Membangun dasar bagi pemantauan dan evaluasi.
- Untuk mengenalkan dan memotivasi pelaksana program dalam pencapaian hasil.
- Untuk mengkomunikasikan dan melaporkan hasil yang telah dicapai kepada stakeholders

Tabel 20. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis 7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Terlaksananya Peningkatan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	97.66%	Terlaksananya Peningkatan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	97.66%	Menunjang	Dengan adanya program dan kegiatan ini maka diharapkan Publikasi media dan Kerjasama denga media baik online dan cetak dapat meningkatkan kwiltas berta.
			Kegiatan : Persentase Tercapainya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Tercapainya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	97.66%		

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 10.452.825.282,-dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 10.114.294.599,-atau sebesar 96.76.%. Dibandingkan dengan tahun tahun 2020, 2021, 2022 persentase realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun mengalami kenaikan Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel x. Realiasasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun Tahun 2024

No		Program Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1		2	3	4	5	6
Penunjang,Pantanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	2.16.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.016.000	10.016.000	8.764.000	87.50
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	440.852.300	472.299.300	459.534.608	97.30
2	2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.235.000	37,235,000.00	37,128,000.00	99.71
3	2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.508.000	61,643,700.00	58,150,000.00	94.33
4	2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.248.800	16,326,800.00	14,565,950.00	89.21
5	2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	393.850.000	402,600,000.00	397,876,000.00	98.83
6	2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.000.000	395,000,000.00	394,620,599.00	99.90
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
8	2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.912.688	32,912,688.00	18,323,917.00	55.67
9	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	422.825.340	422,825,340.00	399,800,000.00	94.55
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
10	2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.560.000	56,320,000.00	53,536,975.00	95.06

11	2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.000.000	170,400,000.00	170,108,222.00	99.83
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik						
12	2.16.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	573.510.000	794,010,000.00	786,960,000.00	99.11
13	2.01.05	Pelayanan Informasi Publik	54.220.000	54,220,000.00	41,560,000.00	76.65
14	2.01.07	Layanan Hubungan Media	975.000.000	2,244,525,000.00	2,243,946,308.00	99.97
15	2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.104.990.000	1,399,515,000.00	1,395,310,000.00	99.70
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika						
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah						
17	2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	817,500,000.00	817,500,000.00	811,015,000.00	99.21
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						
18	2.20.02. 2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	93.620.000	61,815,000.00	51,035,000.00	82.56
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMAS						
19	2.21.02. 2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42,780,000.00	42,780,000.00	41,780,000.00	97.66

Perbandingan capaian realisasi anggaran x (.....) tahun terakhir (20xx - 2024) adalah sebagai berikut.

No	Tahun	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2021	3,474,300,856.	2,424,887,087	69.79
2	2022	8,095,669,524	7,538,270,563	93.11
3	2023	7,579,296,832	7,417,564,939	97.87
4	2024	10.452.825.282	10.114.294.599	96.76.%.

Pada tahun 2021 jumlah anggaran sebesar Rp. **3,474,300,856,-** dengan **2,424,887,087,-** (69,79%) masuk kategori cukup karena ada beberapa sub kegiatan yang realisasinya tidak sesuai dengan target (silpa). Hal ini terjadi disebabkan oleh wabah covid 19 dengan refukusing dan kebijakan lainnya. Tetapi pada tahun 2022-2024 capaian realisasi anggaran telah mencapai rata-rata di atas 95%.

Capaian Realisasi anggaran yang baik dan tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : perencanaan anggaran yang baik, sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengalaman, komitmen bersama semua stakeholder serta koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh stakeholder. Perencanaan anggaran yang baik akan meningkatkan penyerapan anggaran.

BAB IV PENUTUP

Hasil capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun Tahun 2024 secara umum dapat dikatakan Baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini menggambarkan komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja sebagai perwujudan dari visi dan misinya. Hasil evaluasi kinerja tahun 2024 selain memberikan gambaran pencapaian target kinerja, juga menjadi masukan yang sangat strategis untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah senantiasa berkembang termasuk di bidang komunikasi dan informatika merupakan tantangan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun untuk meningkatkan kinerja dengan memperkuat kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam perumusan kebijakan pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Simalungun melalui peningkatan sistem informasi berbasis elektronik (SPBE), komunikasi dan media massa.

Pamatang Raya, Maret 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIMALUNGUN,**

**ANDRI RAHADIAN, AP
PEMBINA TK I
NIP. 197408051993111001**

L a m p i r a n

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

RENCANA AKSI

